

SANTRI VISIT CHINA: RE-AFFIRMING INDONESIA-CHINA CULTURAL RELATIONS

PARA SANTRI MELAWAT KE NEGERI TIONGKOK : MENEGUHKAN KEMBALI HUBUNGAN KEBUDAYAAN INDONESIA - TIONGKOK

<https://doi.org/10.53744/bambuti.v5i2.83>

Submitted: 05-11-2023 Reviewed: 10-11-2023 Published: 09-11-2023

Anitasa Dewi

Universitas Al Azhar Indonesia
anitasadewi14@gmail.com

Feri Ansori

Universitas Al Azhar Indonesia
feriansorialazhar@gmail.com

Saiful Hakim

Universitas Al Azhar Indonesia
saifulhakimalazhar@gmail.com

Abstract

In the last five years, Islamic students have broken the deadlock, filled the void, and disrupted the silence in bilateral relations between Indonesia and China which were too dry and had a political-economic nuance. The Islamic students offer a new perspective on relations between the two countries and make Islamic culture a cultural bridge. They are like new actors, non-state and non-ethnic Chinese actors. Truly. Cultural diplomacy can be practiced by the public sector, private sector and civil society, apart from strengthening relations between two countries, also to increase socio-cultural cooperation or advance national interests. This research is qualitative research involving three scientific disciplines, namely culture, history and communication. The sources and objects for this research are Islamic boarding school students who are currently studying in China and Islamic students who are alumni of Chinese universities who are now working in Jakarta, as well as Islamic student associations in China. Research results prove that cultural diplomacy is very important in strengthening diplomatic relations between Indonesia and China. Cultural diplomacy is an action based on utilizing the exchange of ideas, values, traditions and other aspects of culture or identity. This research also shows that Indonesian students or students who study in China have become active actors or actors who bridge the cultural relations between Indonesia and China, providing new insights and perspectives about China.

Keywords: China Moslems, Cultural Studies, Cultural diplomatic, *santri*,

Abstrak



Bambuti : Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dalam lima tahun terakhir, kaum santri memecah kebuntuan, mengisi kehampaan, dan menghentak kesunyian hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang terlalu kering dan bernuansa politik ekonomi. Kaum santri menawarkan perspektif baru mengenai hubungan kedua negara dan menjadikan Kebudayaan Islam sebagai jembatan kultural. Mereka layaknya aktor baru, non-*state* dan aktor non-etnis Tionghoa. Sesungguhnya Diplomasi kebudayaan dapat dipraktikkan oleh sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil, selain untuk memperkuat hubungan antara dua negara, juga untuk meningkatkan kerja sama sosial-budaya ataupun memajukan kepentingan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif melibatkan tiga disiplin ilmu yakni budaya, sejarah, dan komunikasi. Narasumber dan obyek untuk penelitian ini adalah mahasiswa santri yang sedang studi di Tiongkok dan para santri alumni universitas-universitas Tiongkok yang kini berkarir di Jakarta, serta perkumpulan-perkumpulan mahasiswa Islam di Tiongkok. Hasil Penelitian membuktikan bahwa Diplomasi kebudayaan sangat penting dalam merekatkan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Diplomasi kebudayaan menjadi tindakan yang didasarkan pada memanfaatkan pertukaran ide, nilai, tradisi dan aspek budaya atau identitas lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para santri ataupun mahasiswa Indonesia yang studi ke Tiongkok telah menjadi aktor atau pelaku aktif yang menjembatani hubungan kebudayaan Indonesia-Tiongkok, memberi wawasan dan perspektif baru mengenai Tiongkok.

Kata kunci : Santri, Islam Tiongkok, Studi Budaya, dan Diplomasi Kebudayaan

1. LATAR BELAKANG

Para santri, siswa-siswi lulusan pondok pesantren, menjadi salah satu aktor atau pelaku utama diplomasi kebudayaan Indonesia Tiongkok [1] [2]. Berkat kemampuan berbahasa Mandarin yang baik, mereka dapat melihat langsung kebudayaan Tiongkok. [3] Mereka memahami perubahan sosial dan kemajuan pembangunan di Tiongkok [4]. Selain itu, mereka juga mengunjungi komunitas muslim, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan berziarah situs-situs bersejarah Tiongkok Muslim seperti masjid dan makam. Melalui media sosial, mereka menerangkan dan menceritakan pada publik Indonesia tiga serangkai Dunia Islam Tiongkok: masjid, makam, dan hidangan halal. Hal paling menarik untuk dicermati adalah sikap kritis mereka pada xenophobia.

Satu sikap berlebihan anti negara dan orang Tiongkok. Ini merupakan warisan dari doktrin resmi ideologi dari Orde baru (1966-1978). Tiongkok di era sekarang jelas berbeda dengan Tiongkok di masa awal-awal Orde Baru berdiri. Tiongkok di bawah Deng Xiaoping meninggalkan doktrin lawas, komunisme radikal yang biasa disebut Maoism.[5]. Tiongkok meninggalkan Maoism dan meninggalkan paradigma berfikir ideologis. Tiongkok sekarang ini bersifat terbuka, menjamin hak-hak individu, kepemilikan pribadi.[6] Bahkan, undang-undang di Tiongkok menjamin kebebasan beragama. Islam, Budha, Kristen dan kepercayaan asli mendapatkan kebebasan. Seperti ditegaskan Rizal Sukma bahwa persoalan mendasar hubungan Indonesia Tiongkok adalah persepsi.[7][8] Selalu ada silang persepsi. Salah paham sering terjadi. Sebagian masyarakat Indonesia memandang Tiongkok sebagai ancaman. Padahal, sejak era Deng Xiaoping tahun 1978 Tiongkok berubah. Tiongkok meninggalkan doktrin Maoism, membelenggu Tiongkok pada fanatisme buta pada ideologi sosialis. Deng Xiaoping membawa perubahan radikal pada masyarakat dan budaya Tiongkok dengan menjadikan Tiongkok menjadi lebih terbuka, inovatif, dan terus belajar. Negeri

itu menjadi lebih terbuka pada ide-ide baru. Namun, pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat terlambat dalam memahami perubahan-perubahan di Tiongkok. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan sangat krusial dan sangat diperlukan agar kedua negara menjadi lebih mendalam dan interaksi sosial yang dijalankan lebih bersifat esensial dengan melibatkan beragam beraneka unsur masyarakat sehingga prasangka buruk dan negatif bisa berkurang.

Pada saat ini banyak kaum santri yang belajar ke Tiongkok, selain studi mereka juga menjelajahi negeri Tiongkok. Berbeda dengan generasi santri tua yang mendapatkan pengetahuan tentang negeri Tiongkok dari surat kabar, berita radio, dan televisi, dan buku-buku terjemahan, generasi baru santri memiliki kesempatan untuk melihat langsung negeri Tiongkok. Usai tamat dari pondok pesantren, mereka melanjutkan studi di universitas-universitas Tiongkok pada berbagai jurusan tidak hanya ilmu bahasa melainkan juga ilmu-ilmu sains dan teknik. Seperti di Universitas Huaqiao, Universitas Xiamen, Universitas Nanchang, Universitas Fujian, Universitas Kunming dan sebagainya. Selain belajar di kelas, mereka juga memiliki kesempatan berkunjung ke kota-kota bersejarah di Tiongkok yang terdapat komunitas Muslim yang kuat. Guangzhou, Xian, Quanzhou, Kunming, dan Beijing dan bahkan mengunjungi Kota Urumuqi daerah otonomi khusus Xinjiang. Mereka mengunjungi masjid-masjid kuno bersejarah, makam-makam monumental pemimpin muslim Tiongkok. Mereka juga mengunjungi komunitas muslim, melihat langsung kehidupan kaum muslimin Tiongkok, menunaikan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka menikmati hidangan-hidangan halal tradisional khas etnis muslim Tiongkok. Perpaduan antara tradisi kuliner Arab Persia dan Tiongkok.

Beberapa dari kaum santri ini mencatat dalam blog-bog pribadi dan sebagian dalam bentuk buku harian, tentang perjalanan mereka mengelilingi Tiongkok dan pandangan mereka tentang Tiongkok modern yang berbeda apa yang mereka baca di buku-buku di Indonesia. Sebagian dari mereka menceritakan komunitas-komunitas Muslim di Tiongkok. Persamaan dan perbedaan kehidupan kaum muslimin Indonesia dan Tiongkok. Segi ibadah, segi mazhab, sebagian besar muslim Tiongkok menganut mazhab Hanafi, dan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Fragmen-fragmen dari catatan-catatan perjalanan, paparan pengamatan, dan refleksi pemikiran dari santri yang melawat ke Tiongkok ini masih berserak dan belum terkodifikasi dalam satu kajian sosial kebudayaan komprehensif.

Kehadiran para santri di negeri Tiongkok seperti keluar dari kotak Pandora tradisi pesantren. Menurut tradisi para santri biasa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Islam di Indonesia maupun di Timur Tengah.[9] Kaum santri mencoba menjadikan Islam sebagai jembatan kebudayaan menggali kesamaan dan perbedaan kedua negara. Dalam khazanah politik, kaum santri sangat diperhitungkan karena otoritas keagamaan dan relasi kuat dengan massa.[10] [11] Meski berdiam di negeri Tiongkok, namun tradisi dan kebiasaan mereka untuk menjalankan ibadah sembahyang, membaca Alquran, dan majelis taklim tetap kokoh. Mereka bahkan mendirikan perkumpulan-perkumpulan Islam. Perkumpulan ini, di samping untuk menjaga silaturahmi, juga untuk memprakarsai kegiatan-kegiatan kebudayaan keagamaan di kampus-kampus dan masyarakat umum Tiongkok.

Sejak normalisasi hubungan bilateral Indonesia Tiongkok, aktor-aktor utama hubungan kedua negara terbatas pada lingkaran pemimpin pemerintahan, diplomat dan pengusaha. Lingkaran elit di Jakarta maupun di Beijing lebih tertarik membicarakan rencana kerja sama ekonomi, bisnis, investasi, dan perdagangan. Sebagai contoh Belt Road Initiative, Asia Infrastructure Investment Bank, Comprehensive Strategic Partnership Indonesia Tiongkok. Oleh karena itu tidak dapat diabaikan jika persepsi publik Indonesia tentang Tiongkok adalah tentang ancaman.[12] Kenyataan ini menjadi kelemahan hubungan Indonesia Tiongkok karena hanya direduksi pada perhitungan untung dan rugi, dan kemudian berujung pada persepsi negatif dari sisi publik Indonesia karena memandang Tiongkok sebagai ancaman, menguasai ekonomi dan sumber daya alam Indonesia, dan sekali lagi persepsi ideologis bahwa Tiongkok negeri komunis yang agresif kembali muncul. Untuk itu diplomasi kebudayaan menjadi penting dan sangat diperlukan, dengan melibatkan unsur masyarakat yang lebih beragam

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan juga interdisipliner karena melibatkan tiga disiplin ilmu, yakni antropologi, sejarah, dan komunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desk study, field study, dan wawancara mendalam. Desk Study dalam penelitian ini mencakup penelusuran sumber-sumber sekunder tentang santri. Kajian tentang santri dan buku, disertasi dan tesis yang mendiskusikan santri cukup banyak. Biasanya mencakup peran santri dalam politik nasional Indonesia dan memang adalah mustahil membahas dan menulis politik Indonesia tanpa mendiskusikan peran kaum santri. Dalam sejarah politik Indonesia, kaum santri mendirikan partai politik besar, Masyumi pada awal kemerdekaan. Selain itu, kaum santri melahirkan beberapa negarawan terkemuka di Indonesia. Selain politik, beberapa studi membahas santri dari segi pendidikan dan kebudayaan. Kajian-kajian itu membahas tentang perubahan-perubahan pandangan hidup santri seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di pondok dan lingkungan pedesaan akibat program pembangunan. Studi literatur tentang santri sangat penting untuk mendapatkan definisi dan pengertian santri yang lebih mendalam.

Field Study digunakan untuk menelusuri data-data penting berupa catatan para santri yang sedang dan telah menempuh studi di Negeri Tiongkok. Kebanyakan dari mereka tidak menuliskan pengalaman mereka ke dalam sebuah buku yang komprehensif namun dalam blog-blog di media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan weblog, bahkan youtube. Ini semua merupakan data-data penting dan menarik untuk dianalisis. Media-media sosial ini bukan hanya menampilkan catatan-catatan tapi juga foto-foto tentang situs-situs sejarah Islam di Tiongkok seperti masjid dan restoran halal, dan komunitas-komunitas muslim Tiongkok. Catatan-catatan perjalanan, foto, dan vlog mereka ini masih berupa fragmen-fragmen yang berserak dan menarik untuk dikaji. Dan memang, kebanyakan dari mereka adalah juga termasuk dalam generasi milenial, yang lebih akrab dengan teknologi media masa kini dibandingkan dengan generasi tua. Mereka lebih akrab dengan laptop dan handphone ketimbang dengan kertas dan pena.

Wawancara mendalam dilakukan pada pengurus perkumpulan-perkumpulan mahasiswa muslim Indonesia di Tiongkok. Sebagai contoh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Tiongkok. PCINU Tiongkok.

Beberapa dari mereka memang memiliki latar belakang santri dari pondok pesantren tradisional di Jawa Tengah dan Timur. Berbeda dengan perkumpulan mahasiswa Indonesia di Tiongkok, PCINU Tiongkok mendapatkan surat pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, dan majelis taklim ala NU di Tiongkok.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terbaru tentang eksistensi dan peran santri dalam diplomasi kebudayaan Indonesia Tiongkok adalah kumpulan tulisan para santri di Tiongkok dengan editor, ketua pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Tiongkok, Ahmad Syaifuddin Zuhri. [3] Meskipun buku ini adalah kumpulan tulisan, terutama pengalaman pribadi dan catatan harian dari santri-santri yang sedang studi di Tiongkok, namun buku ini menegaskan dengan baik sudut pandang non elite, non state actor, dan bukan kalangan Tionghoa. Kumpulan tulisan ini meneguhkan betapa masyarakat Indonesia, terutama kalangan santri, kini tengah berupaya untuk memahami kebudayaan dan peradaban Tiongkok. Kehadiran kaum santri di Tiongkok melahirkan fenomena baru, unik, dan berbeda. Perspektif para santri tentang Tiongkok tentu berbeda dari elit politik dan kalangan Tionghoa Indonesia. Para santri ini tidak segan-segan menampilkan ketaatan beribadah, dengan mengunjungi komunitas muslim setempat, berziarah ke makam-makam pemuka Islam Tiongkok, dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan Islam ala Tiongkok. Buku ini membangun pandangan positif karena terbukti bahwa mereka bisa dan bebas menjalankan ibadah terutama shalat lima waktu, dan mendapatkan akses hidangan halal. Apa yang dikhawatirkan ketika berada di Tiongkok ternyata tidak terjadi dan malahan Islam di Tiongkok punya akar panjang dan mendalam terutama di kota-kota bersejarah seperti Quanzhou, Xian, dan Beijing.

Kajian berikutnya karangan Novi Basuki [4], Ada Apa Dengan Tiongkok. Novi adalah seorang santri alumni pondok pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur. Novi mungkin untuk saat ini adalah contoh terbaik seorang santri yang berhasil menguasai Bahasa Mandarin dengan sangat baik, dan juga berhasil menempuh studi di tingkat sarjana, di Universitas Huaqiao dalam bidang pendidikan Bahasa Mandarin, dan tingkat master di Universitas Xiamen dalam bidang Studi Internasional. Buku ini merupakan kumpulan dua puluh tiga esai karangan reflektifnya yang tersebar di berbagai surat kabar online dan media sosial.

Tuty Muas dalam tulisannya memberikan contoh studi diplomasi kultural dalam konteks hubungan diplomatik Indonesia Tiongkok.[13] Ia menjelaskan alasan kultural dari pihak Tiongkok dalam pemulihan kembali, atau normalisasi, hubungan Indonesia Tiongkok pada 1990. Tiongkok dengan cerdas menjalankan Diplomasi Tanpa Kehilangan Muka dalam melakukan pendekatan kepada pemerintah Indonesia agar setuju melakukan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga temuan penting dari studi ini. Pertama, para santri adalah para pelajar, termasuk mahasiswa, yang pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren sehingga memiliki seperangkat ilmu-ilmu agama seperti fiqih, bahasa arab klasik, aqidah, dan syariat. Selain taat menjalankan ibadah, mereka memahami ajaran-ajaran Islam secara lebih mendalam jika dibandingkan dengan orang-orang Islam awam. Kedua, para santri mewarnai hubungan persahabatan Indonesia Tiongkok sehingga panggung diplomasi kedua negara tidak hanya diisi dan dikuasai oleh para investor, pebisnis dan diplomat. Ketiga, para santri menjadi sumber alternatif pengetahuan baru tentang Tiongkok Modern bagi komunitas muslim Indonesia. Prasangka negatif terhadap Tiongkok di kalangan muslim sangat kuat karena Tiongkok dianggap sebagai negara komunis dan ateis yang jahat dan menindas umat Islam. Dua kata ini punya arti sangat menakutkan, menyeramkan, dan mencemaskan bagi komunitas muslim. Benar, dalam sejarah Tiongkok, pernah terjadi penindasan terhadap umat Islam, yakni pada masa Revolusi Kebudayaan. Namun, penindasan ini tidak hanya terjadi pada umat Islam saja melainkan pada semua umat agama lain di Tiongkok, termasuk adat istiadat dan tata krama budaya Tiongkok. Klenteng, vihara, masjid, gereja, dan bangunan bersejarah dihancurkan. Pemerintah dan orang-orang Tiongkok mengenang revolusi kebudayaan sebagai masa kelam dan menyakitkan. Setelah Reformasi Ekonomi dan Kebijakan Pintu Terbuka, pemerintah memulihkan kembali kehidupan beragama dan memugar rumah-rumah ibadah termasuk masjid. Persepsi baru semacam ini jarang dan susah dipahami oleh komunitas muslim Indonesia. Bahwa ada banyak masjid dan makanan halal di Tiongkok masih susah dan sulit dipahami.

1. Kaum Santri

Santri secara umum mengacu pada seseorang yang mengikuti pendidikan dan pembelajaran Islam di pesantren. Biasanya santri menetap di pesantren hingga pendidikannya selesai. Kaum santri memiliki penilaian yang kokoh terhadap ortodoksi Islam. Kalangan awam mungkin tidak acuh terhadap doktrin tetapi menjalankan ibadah seperti shalat dan puasa. Namun perhatian kaum santri terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan aspek ritual Islam. Untuk kalangan santri peribadatan pokok juga penting khususnya sholat, pelaksanaannya secara sadar dianggap oleh kalangan santri maupun non-santri sebagai ciri utama dari seorang yang benar-benar santri. Yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama moral dan sosialnya. Mempertahankan Islam sebagai kode etik lebih tinggi tingkatannya bagi orang muslim yang berpikiran modern, sebagai doktrin sosial yang dilaksanakan masyarakat modern dan sebagai sumber nilai yang subur bagi budaya modern. Aspek doktrinal ini kurang ditekankan di daerah pedesaan. Etika santri kadang dianggap agak dekat dengan abangan di daerah. Akan tetapi bahkan di pedesaan seorang santri berbeda dari seorang abangan, tidak saja dalam pernyataannya sendiri bahwa secara keagamaan dan realisasinya ia merasa lebih tinggi dari kaum abangan. Saat ini secara umum santri dimensinya telah bergeser. Bukan pengetahuan tentang detail atau disiplin spiritual yang penting, namun lebih kepada penerapan doktrin Islam dalam kehidupan. Jenis kaum

santri pun beraneka ragam, dari yang perbedaannya dengan tetangganya yang abangan tampak hanya terletak pada sikap bersikeras bahwa mereka ini benar-benar muslim sejati, sementara tetangga mereka tidak, sampai kepada mereka yang komitmennya kepada Islam mendominasi hampir seluruh kehidupan mereka.

Kaum santri memiliki sikap relativisme tanpa emosi serta keterikatan yang minim terhadap adat. Sikap santri berbeda dengan sikap etnolog pecinta budaya yang keranjingan mengumpulkan adat tua. Kaum santri fokus pada penekanan kuat pada keharusan iman dan keyakinan penuh terhadap kebenaran mutlak agama Islam. Jelas ada sikap tidak toleran yang mencolok terhadap kepercayaan dan praktik adat yang mereka anggap sebagai heterodoks.

2. Santri mewarnai hubungan pesahabatan Indonesia- Tiongkok

Jika membaca karya klasik David Mozingo, Sheldon Simon, Rizal Sukma, dan sejumlah penulis lainnya, hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok fokus pada politik, kerja-kerja diplomat, politisi dan kebijakan luar negeri. Sebaliknya, karya-karya Tiongkok cenderung untuk memandang pertukaran budaya sebagai fungsi dan pendukung bagi diplomasi resmi. Tiongkok digambarkan sebagai kekuatan baik hati, yang selama berabad-abad telah membawa fasilitas dan pengayaan budaya, berkisar dari sejumlah kosa kata dalam bahasa Indonesia dan desain motif batik hingga bentuk khusus dari ekspresi kesusastraan. Kontribusi positif etnis Tionghoa sebagai jembatan dalam pertukaran budaya ini sering kali menjadi hal yang ditekankan. Peran orang-orang muslim dalam hubungan kedua negara jarang dibahas dan didiskusikan

Selama ini jika perbincangan, isu maupun wacana diplomasi Tiongkok selalu terkait dengan aktor-aktor besar seperti diplomat tinggi, pejabat tinggi negara terutama dari beberapa kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, dan juga pengusaha terutama dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Lagi pula, kebijakan luar negeri Tiongkok sejak masa naiknya Xi Jinping sebagai pemimpin negara Tiongkok memperlihatkan sikap agresif menawarkan kerja sama di bidang infrastruktur besar dalam proyek Belt Road Initiative (BRI) di mana di dalamnya Tiongkok menawarkan kerja sama pembangunan infrastruktur raksasa seperti pelabuhan, bandar udara, jembatan, pembangkit listrik, pabrik dan bahkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah Indonesia sendiri terutama para elit politik dan elit bisnis sangat antusias dengan tawaran kerja sama tersebut. Hal ini tidak mengejutkan karena selama hampir dua puluh tahun ini sebagian besar pemimpin pemerintahan Indonesia dipegang oleh elit bisnis yakni para pengusaha yang sangat antusias dengan peluang bisnis. Proyek BRI dari Tiongkok ini merupakan proyek raksasa yang mencoba menawarkan model pembangunan ekonomi ala Tiongkok di mana infrastruktur menjadi tenaga penggerak dari pembangunan ekonomi dan gerak roda perekonomian.

Hubungan Tiongkok Indonesia menampilkan wajah bisnis yang terlalu kuat dan bahkan sangat dominan. Maka mendiskusikan dan memwacanakan Tiongkok di Indonesia selalu terkait penuh dengan bisnis. Perbincangan para diplomat Indonesia dan Tiongkok selalu tentang Kerja sama Proyek Infrastruktur. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah karena tema-tema bisnis akan berujung pada untung dan rugi. Meskipun Tiongkok selalu menekankan pada asas Win-Win Solution dan asas Harmoni namun sesungguhnya posisi Indonesia masih dalam perdebatan. Tiongkok memiliki kemampuan modal, teknik, teknologi, dan

juga tenaga kerja yang sangat besar dan sangat kuat jika dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri selalu menawarkan potensi-potensi sumber daya alam mineral yang memang dibutuhkan oleh industri Tiongkok.

Diplomasi kultural kurang menjadi fokus perhatian dari aktor-aktor negara. Perhatian terhadap diplomasi kebudayaan masih sangat lemah. Fakta paling nampak bisa dilihat secara langsung adalah minimnya jumlah pakar-pakar Tiongkok di kalangan publik intelektual Indonesia. Jika pun ada kajian Tiongkok di Indonesia di perguruan tinggi maka kajian itu hanya terbatas pada pendidikan bahasa. Lebih parah lagi, jurusan-jurusan Bahasa Mandarin jumlahnya pun masih sangat terbatas. Namun jika dilihat secara lebih mendalam maka program jurusan Bahasa Mandarin ini sebagian besar masih baru dalam arti baru saja didirikan kecuali Universitas Indonesia yang memang telah lama berdiri dan pewaris dari tradisi sinologi Indonesia. Meskipun demikian, kemunculan program studi bahasa mandarin di jaringan kampus milik pemerintah ini memperlihatkan semangat baru dari kalangan akademisi dan intelektual Indonesia terhadap Tiongkok meskipun masih fokus pada kajian bahasa. Seberapa jauh peran intelektual dari program studi bahasa mandarin di kampus-kampus pemerintah masih perlu analisis, pengkajian, dan penggalian informasi yang lebih mendalam.

Selain itu, telah tampil pula anak-anak santri lulusan pondok pesantren tradisional, atau pernah menempuh pendidikan tradisional di pondok pesantren, atau hidup dalam kebudayaan, khazanah dan tradisi Islam tradisional di dalam lingkaran kegiatan diplomasi Indonesia Tiongkok. Kelompok ini benar-benar dan sungguh-sungguh meramalkan aktifitas diplomasi kultural, satu konsep diplomasi yang tidak hanya dikuasai oleh diplomat profesional namun juga aktor-aktor non –negara yang memiliki pengetahuan dan ketertarikan kepada Tiongkok. Diplomasi Kultural Indonesia Tiongkok yang selama ini panggunanya dikuasai oleh aktor-aktor klasik seperti diplomat, dan komunitas etnis Tionghoa Indonesia, kini diramalkan oleh anak-anak muda santri dari jaringan pondok pesantren tradisional. Berbeda dengan Universitas Al Azhar Indonesia yang masuk ke dalam diskursus Diplomasi Tiongkok melalui satu lembaga resmi Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia (PBM UAI) yang tentu saja sangat profesional, rapi, dan terukur, anak-anak muda santri ini meramalkan aktifitas diplomasi Tiongkok secara lebih informal di mana kekuatannya lebih kepada alternatif memahami pengetahuan baru. Memahami modernitas yang berbeda. Fokusnya adalah kepada diseminasi, atau penyebaran, pengetahuan baru tentang Tiongkok modern yang lebih terbuka, berkembang dan bahkan maju secara sains teknologi dan ekonomi. Tujuannya memang lebih ke dalam yaitu mendidik umat untuk melihat Tiongkok dan orang-orang Tionghoa secara lebih positif. Perlu diketahui bahwa prasangka negatif kaum muslim Indonesia baik itu kalangan modern, tradisional, maupun kelompok baru seperti salafi, masih sangat kuat dan memang cenderung sangat mengakar. Politik anti Tiongkok masih sangat kuat dan cenderung diproduksi terus menerus terutama menjelang pemilihan umum. Tiongkok selalu menjadi ancaman dan komunitas Tionghoa yang lama tinggal menetap dan bekerja di Indonesia dianggap sebagai bagian dari ancaman itu. Tiongkok selalu dilekatkan dengan isu komunisme, ateisme, dan penindasan kepada umat Islam.

Fakta unik dari anak-anak santri ini adalah keberhasilan mereka mendirikan organisasi perwakilan Nahdlatul Ulama di Tiongkok. Peresmian dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Tiongkok selain dihadiri oleh pengurus besar, atau pengurus tertinggi, juga dihadiri oleh staf diplomat

Tiongkok, yakni konsul Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya. Artinya, pemerintah Tiongkok mengetahui dan mengakui keberadaan organisasi keagamaan ini di Tiongkok.

PCINU Tiongkok aktif melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi kultural. Mereka membangun hubungan sangat baik dengan duta besar Indonesia untuk Tiongkok dan mengajak kerja sama dalam hal kegiatan yang intinya berusaha memperkuat hubungan kultural kedua negara. Salah satunya adalah webinar bertajuk 70 Tahun Indonesia-Tiongkok: Dari Diplomasi, Ekonomi, Teknologi, Hingga Santri. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mendorong Nahdlatul Ulama lebih berperan lagi dalam menjembatani hubungan antara Indonesia dan China. Hubungan kedua negara sudah berlangsung 70 tahun itu. "NU punya peran yang luar biasa dalam lahirnya NKRI. Jadi ke depan, NU akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam hubungan Indonesia dengan China. Djauhari juga berharap NU tidak kenal lelah dalam mengedukasi masyarakat mengenai hubungan kedua negara yang mengalami pasang-surut ini. Menurut Djauhari, yang mendasari penguatan kemitraan antarnegara adalah hubungan antarmasyarakat kedua negara. Semakin banyak pelajar Indonesia ke China dan semakin banyak pelajar China ke Indonesia, maka hubungan semakin kuat. Intinya, beliau memberikan respon positif tampilnya para santri dalam diplomasi Indonesia Tiongkok.

Pakar Muda Tiongkok dan juga Staf Pengajar di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Dr. Yeremia Lalisang menjelaskan bahwa "Santri sekarang memainkan porsi yang signifikan, walaupun dari segi jumlah relatif kecil. Tapi justru dari yang kecil ini paling aktif sehingga menjadi perhatian khusus karena terkadang jumlah tidak mencerminkan kualitas. Yeremia berharap makin banyak kalangan santri yang berminat belajar di China. Sebaliknya, Pengurus PCINU Tiongkok Imron Rosyadi Hamid mengatakan perlu waktu untuk mengubah sikap masyarakat Indonesia lebih baik lagi dalam memandang hubungan Indonesia-China. Baginya ini sebenarnya tugas bersama. PCINU telah banyak berkomunikasi dengan teman-teman muslim di China.

Dalam konteks kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok maka arus pelajar Indonesia yang studi ke luar negeri saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat ini tak kurang ada lebih dari 30 ribu pelajar Indonesia yang menempuh studi di luar negeri. Salah satu destinasi studi favorit bagi pelajar Indonesia adalah Tiongkok. Tiongkok saat ini menjadi destinasi favorit pelajar Indonesia nomor dua setelah Australia. Dikutip dari data Atase Pendidikan KBRI Beijing, Pelajar Indonesia di Tiongkok pada 2019 lalu berjumlah 15.780 orang. Dengan berbagai macam latar belakang disiplin keilmuan. Gelombang tingginya pelajar Indonesia yang studi ke Tiongkok meningkat pasca tahun 2000an, khususnya setelah tahun 2011, dengan berbagai macam latar belakang masyarakat. Kemajuan pesat ekonomi, teknologi dan pengaruh Tiongkok secara global saat ini menjadi salah satu alasan. Selain itu, arus investasi Tiongkok ke Indonesia yang semakin meningkat yang saat ini menduduki peringkat dua setelah Singapura di Indonesia menjadi alasan tersendiri.

3. Santri sebagai sumber pengetahuan baru tentang Tiongkok Modern

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok bisa dibilang cenderung negatif. Dua hal melekat erat pada nama Tiongkok adalah komunis dan ateis. Negara, dalam hal ini pemerintah Orde Baru, memproduksi pengetahuan anti

komunis dan anti Tiongkok secara sistematis melalui buku resmi sejarah nasional biasa disebut yang buku putih. Dalam buku resmi ini Tiongkok dianggap terlibat dalam kudeta karena membantu PKI. Buku putih ini diajarkan di sekolah-sekolah dan wajib dibaca. Selain itu, setiap tahun di stasiun Televisi Nasional diputar film Pemberantasan G30 PKI yang menggambarkan kekejaman Partai Komunis Indonesia. Pemerintah juga memperingati hari Kesaktian Pancasila yang di dalamnya memperlihatkan semangat anti Komunis dan anti Tiongkok. Sikap anti komunis dan anti Tiongkok ini kemudian menjelma menjadi meta-narasi yang sangat kokoh dan menjadi identitas politik nasional.

Satu hal harus diingat kembali adalah kelahiran pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Suharto dan Angkatan Darat. Salah satu legitimasi orde baru adalah kebijakan anti komunis. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk penumpasan PKI, dan pembekuan hubungan diplomatik Indonesia dengan RRT. Bagi pemerintah Orde Baru, komunisme dan Tiongkok dianggap setali tiga uang sebagai sisi yang sama. Pemerintah Orde Baru kemudian mengganti kata Tiongkok dengan kata Cina, dan melarang segala atribut kebudayaan Tiongkok, melarang Bahasa Mandarin, dan memaksa orang-orang Tionghoa Indonesia mengubah nama Tionghoa menjadi nama Indonesia.

Kini Orde Baru telah runtuh namun sikap anti Komunis dan anti Tiongkok tampaknya masih utuh. Kalau dulu sikap anti Komunis ini diproduksi secara rutin dan berulang-ulang oleh negara maka sekarang sikap ini diproduksi oleh publik. Kenyataan inilah yang kemudian menjadi beban dalam hubungan Indonesia Tiongkok. Dengan meta narasi semacam inilah maka pemerintah dan masyarakat Indonesia kadang tidak bisa melihat Tiongkok secara lebih jernih. Bahwa Tiongkok juga mengalami perubahan politik dan perubahan ekonomi yang sangat dahsyat masih susah dipahami. Bagi sebagian besar pejabat dan publik Indonesia, Tiongkok kadang masih dibayangkan sebagai sebuah negara komunis di mana hak pribadi tidak ada, usaha swasta dilarang, agama dan rumah ibadah dihancurkan, dan umat Islam mengalami penindasan.

Oleh karena pembekuan hubungan diplomatik itu maka orang-orang Indonesia tidak bisa melihat dan memahami perubahan besar di Tiongkok yang terjadi berkat Reformasi Ekonomi dan Kebijakan Pintu Terbuka. Tiongkok sejak masa Deng Xiaoping berkuasa memilih untuk meninggalkan sistem ekonomi terencana. Tiongkok meninggalkan sosialisme dan menerapkan sistem ekonomi pasar secara bertahap dan menerima investasi asing. Selain itu, sejak masa Deng Xiaoping inilah, pemerintah mengakui dan melindungi agama dan rumah ibadah. Masjid-masjid yang pada masa revolusi kebudayaan dihancurkan kini dibuka dan dipugar kembali dan digunakan untuk beribadah.

Ketika banyak santri studi di Tiongkok maka pengetahuan tentang Tiongkok yang modern mulai tampak secara luas. Kelebihan para santri ini adalah mereka bisa berbicara Bahasa Mandarin dan melihat langsung perubahan yang terjadi di Tiongkok. Satu hal yang bisa mereka buktikan, dan selama ini menjadi pertanyaan di kalangan publik Indonesia, adalah eksistensi masjid dan makanan halal di Tiongkok. Mereka pada awalnya sangat terkejut melihat masjid-masjid berdiri megah di kota-kota di Tiongkok. Selain itu, ada banyak restoran halal di kota-kota besar di Tiongkok. Ini berujung pada kesadaran bahwa di negara komunis masyarakat Muslim eksis dan hidup aman di Tiongkok. Beberapa santri NU seperti Novi Basuki, Ahmad Syaifuddin Zuhri, Hilyatul, Ahmad Nurkholis, Imron rajin menulis artikel tentang dunia Islam Tiongkok dan informasi mereka ditujukan terutama untuk komunitas di dalam, yakni jamaah NU dan juga masyarakat umum. Novi Basuki banyak menulis tentang relasi antara Islam, PKT, dan Negara. Ia tidak kenal lelah menjelaskan

kepada publik muda bahwa Tiongkok sekarang berbeda dengan Tiongkok masa lalu. Tiongkok sekarang lebih fokus pada pembangunan ekonomi, sains dan teknologi. Negara ini tidak lagi menjalankan ide komunis dan sosialis secara dogmatis. Basis dan doktrin politik Tiongkok sekarang ini adalah pragmatisme dan ini sangat mirip dengan doktrin politik negara kota yang kecil tapi powerful Singapura. PKT di Tiongkok lebih mirip dengan Partai Aksi Rakyat di Singapura. Manajemen dan birokrasi yang dijalankan di kedua partai itu mengikuti model meritokrasi dan birokrasi bisnis perusahaan. Mereka yang bekerja keras dan berhasil membangun prestasi dan legasi akan mendapatkan promosi jabatan atau naik pangkat.

Hal paling menarik adalah kenyataan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap umat Islam oleh Pemerintah Tiongkok kadang membuat bingung para santri. Ketika tiba di Tiongkok lalu melihat masjid dan orang-orang muslim sholat, fakta ini seperti bertolak belakang dengan persepsi dan doktrin yang selama ini dipercayai. Bahwa komunis anti agama dan bahwa komunis menindas agama. Lebih mengejutkan lagi rumah-rumah makan halal hampir dipastikan ada dan tersedia di ruang-ruas jalan strategis, kawasan bisnis, dan pemukiman penduduk, dan juga di kantin-kantin di universitas. Para santri ini kemudian memahami bahwa umat Islam di Tiongkok, seperti di Indonesia, terdiri dari beragam etnis. Meski demikian ada dua ciri pokok dari umat Islam di Tiongkok yakni kelompok etnis Uighur dan etnis Hui. Etnis Uighur sampai saat ini menghadapi tekanan dari pemerintah Tiongkok karena mereka ingin memisahkan diri. Orang-orang Uighur memang memiliki ciri fisik yang berbeda dibanding orang Tiongkok. Wajah dan ciri fisik mereka memang lebih mirip orang Turki. Bahasa dan Budaya mereka pun lebih mirip dengan orang-orang Asia Tengah terutama Turki. Mereka kesulitan untuk berbicara dalam Bahasa Mandarin dan beradaptasi dengan kebudayaan Tiongkok. Sementara itu, etnis Hui lebih mirip dengan Han, etnis mayoritas di Tiongkok. Orang-orang Hui adalah keturunan pedagang-pedagang Arab dan Persia di masa silam. Orang-orang Tiongkok sendiri sangat akrab dengan orang Hui. Mereka dianggap sebagai orang asing yang tidak asing karena bisa berbahasa Mandarin. Bahasa. Hal yang membedakan hanya dalam segi makanan dan ibadah. Orang Hui tidak makan daging babi, minum arak, dan taat menjalankan agama. Kelompok etnis ini tinggal menyebar di seluruh Tiongkok dengan konsentrasi di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunnan dan Qinghai serta menjadi entitas yang mampu melakukan akulturasi budaya.

Patut diketahui bahwa meskipun memiliki haluan komunis, konstitusi Tiongkok tetap menjamin rakyatnya untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Dalam Pasal 36 xianfa (konstitusi) mereka disebutkan, "Setiap warga negara menikmati kebebasan memeluk agama. Tidak ada organ negara, organisasi publik atau individu yang dapat memaksa warga negara untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara yang memeluk atau tidak memeluk agama". Tiongkok hanya mengakui lima agama resmi : Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Tao.

Keberadaan Islam sebagai agama resmi ditandai berdirinya Asosiasi Islam Tiongkok (*Zhongguo Yisilanjiao Xiehui*) di Tahun 1953, meskipun perkembangannya mengalami stagnant setelah Mao Zedong menjalankan Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Naiknya Deng Xiaoping Tahun 1978 dengan reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka (*gaige kaifang*), memberikan angin segar bagi perkembangan agama-agama di Negeri Tirai Bambu ini. Tahun

1979, Deng Xiaoping menghidupkan kembali Departemen Agama (*Guojia Zongjiao Shiwu Ju*) dan mengizinkan pembukaan kembali gereja, kuil dan masjid di seluruh Tiongkok. Hanya hitungan bulan dari penerapan kebijakan ini, jumlah masjid, gereja dan kuil meningkat pesat di Tiongkok. Pada Tahun 1980 Pemerintahan Deng mengizinkan diselenggarakannya Mukhtar Islam Tiongkok setelah puluhan tahun *vacum* dan dihadiri 256 delegasi dari berbagai etnik muslim. Kebijakan Deng di bidang agama ini oleh Fenggang Yang (2004) disebut sebagai *bringing religious life back to the public scene* (membawa kembali kehidupan beragama ke ruang publik).

Kunjungan Xi Jinping ke Masjid Xincheng di Kota Yinchuan Ningxia dan berdialog dengan pengurus dan warga muslim Bulan Juli 2016 menjadi simbol awal keseriusannya untuk meletakkan urusan agama sebagai salah satu prioritas dalam memimpin Tiongkok. Beberapa bulan sebelumnya, 22 April 2016 dalam pembukaan Konferensi Nasional Agama-agama di Beijing, Xi Jinping menyatakan "*religion is, as always, one of the priorities must handle properly in governing the country. Our initiatives in regard to religion play a particularly important role in the overall work of the country*" (Xi Jinping The Governance Of China, 2017: 329). Beberapa bulan setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Masjid Xincheng, Pemerintah Tiongkok merilis Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (*National Action Plan of Human Rights*) 2016-2020 dengan memasukkan perbaikan pelayanan ibadah haji bagi Umat Islam sebagai salah satu programnya. Tahun lalu Pemerintah Tiongkok juga meluncurkan kebijakan Reformasi Demokrasi di Tibet dan mengaitkan persoalan perlindungan kebebasan beragama, salah satunya, berkait dengan keberadaan empat masjid dan dua belas ribu muslim di sana (Tiongkok Daily, 28 Maret 2019).

Kebijakan baru dikeluarkan otoritas Tiongkok adalah program 'signifikasi Islam' (*Sinification of Islam 2018-2022*) yang bertujuan menyelaraskan Islam dengan norma-norma Tiongkok. Banyak pihak mengkritik *xingzheng fagui*, aturan administrasi, ini sebagai bentuk *xenophobia* atas sesuatu yang berbau Islam di tengah maraknya pemberitaan atas nasib etnik Uyghur di Xinjiang, tetapi pemerintahan Xi Jinping berpandangan perlu menciptakan suasana baru bagi penyebaran dan pengembangan agama-agama di Tiongkok termasuk Protestan dan Katolik. Kebijakan signifikasi Islam 2018-2022 yang pembahasannya melibatkan Asosiasi Islam dari delapan propinsi di Tiongkok tersebut memuat *historical background* terkait kedatangan Islam ke Tiongkok yang dimulai sejak era Dinasti Tang (618-907) dan Song (960-1279). Bahkan di era Dinasti Yuan (1271-1368), ada badan khusus yang bertanggung jawab terhadap urusan Agama Islam baik di pemerintahan lokal maupun pusat. Wajah 'Islam Tiongkok' mulai tampak di era Dinasti Ming (1368-1644) dan Qing (1644-1911), dengan pembentukan sistem komunitas masjid (*sifang*) dan pembelajarannya (*jingtang jiaoyu*)

Salah satu tulisan yang menarik adalah catatan dari Ahmad Syaifuddin Zuhri, pengurus PCI NU Tiongkok tentang serba serbi masjid di satu kota besar di Tiongkok :

Hari Jumat adalah hari istimewa bagi umat Islam. Jumat kemarin. Saya mencari informasi nama-nama masjid di Kota Wuhan, ibukota Provinsi Hubei, China bagian tengah. Saya mencoba dengan mesin pencarian Baidu berbahasa Mandarin. Mudah dan akurat. Ada empat masjid di Kota Wuhan ini yang terdeteksi. Tiga masjid sudah pernah saya kunjungi, yaitu Masjid Majiazhuang, Masjid Qiyi, dan Masjid Jiang An. Saya penasaran dengan satu masjid lagi, Masjid Min Quan Lu. Sudah setahun di Wuhan, saya belum pernah ke tempat ini. Saya mengajak salah satu sahabat

saya, Ahmad Syifa, yang juga pengurus NU Tiongkok, untuk bersama mencarinya. Bermodal aplikasi peta di hape. Sesuai saran dalam aplikasi tersebut, kami mencarinya dengan naik transportasi MRT dan lanjut dengan layanan berbagi sepeda publik yang tersebar di tempat-tempat umum. Masjid Min Quan Lu Masjid ini rada susah dicari karena yang kami temukan awalnya adalah gang kecil dengan deretan toko penjual daging sapi dan kambing halal. Deretan toko itu sekitar 50 meter. Tiba di sekitar situ, kebetulan bertemu seorang laki-laki dewasa berpeci putih. Setelah saya tanyakan ke orang tersebut, ditunjukkan arah masjidnya dengan naik ke lantai dua. Masuk di antara sela-sela salah satu toko penjual daging. Kecil dan di luar tidak tampak ada bangunan layaknya masjid. Tidak seperti masjid-masjid yang biasa saya temukan di China. Ceramah sebelum khutbah Jumat di Masjid Min Quan. Saya masuk ke tempat shalat. Ada dua lantai yang digunakan untuk Shalat Jumat. Mungkin satu lantai muat sekitar 50 jamaah. Masjid ini yang terkecil yang saya temukan di antara masjid lainnya di Kota Wuhan. Usai Shalat Jumat, kami melihat-lihat dan membeli daging sapi di gang depan masjid. Sekilo daging sapi harganya 80 yuan atau sekitar 160 ribu rupiah. Daging kambing 74 yuan atau sekitar 148 ribu rupiah. Deretan penjual daging sapi dan kambing di depan Masjid Min Quan Lu. Setelah membeli daging sapi, kami melanjutkan perjalanan ke masjid lain, yakni Masjid Jiang An. Jarak di peta tertera sekitar 40 menit dengan jalan kaki, dilanjutkan naik bis kota berbahan listrik bertarif dua yuan. Masjid Jiang An Ini kali kedua saya ke Masjid Jiang An. Pertama kali ke masjid ini pada November 2018 lalu. Jaraknya cukup jauh dari apartemen saya, sekitar 1,5 jam dengan naik MRT. Masjid empat lantai ini cukup besar. Lantai pertama untuk kantor, tempat wudhu, dan dapur umum. Lantai dua, ruang shalat utama yang cukup luas. Lantai ketiga, ruang-ruang kelas dan aula. Lantai keempat, kami tidak bisa masuk karena terkunci. Biasanya usai Shalat Jumat, ibu-ibu muslimah di masjid ini membagikan sup daging dan roti ke semua jamaah. Tapi karena kami datangnya jam 3 sore, masjid sudah sepi. Tak ada aktivitas. Masjid ini adalah bangunan satu-satunya yang masih berdiri di sekitar situ. Karena bangunan-bangunan lama di sekitarnya sudah dirobohkan dan akan dibangun kompleks gedung modern.

Usai Shalat Ashar, kebetulan kami bertemu dengan marbot atau penjaga masjid. Usianya masih muda, sekitar 20-an tahun. Namanya Zaid. Saya bertanya perihal masjid dan lain-lain. Masjid ini akan dipindah rencana musim panas tahun 2020. Pemerintah setempat memfasilitasi dengan bantuan dan mengganti ke lahan baru yang jaraknya sekitar 1,3 kilometer dari masjid yang sekarang. Bangunannya sudah jadi tinggal menunggu tahap akhir dan perizinan keluar dari pihak yang berwenang, kata Zaid. Saya bertanya ke Zaid bagaimana untuk menuju ke lokasi tersebut. Zaid memberi petunjuk di aplikasi peta di hape saya. Lalu kami lanjutkan mencarinya. Sebelum mencari masjid baru tersebut. Karena lapar, kami mengisi perut dahulu di restoran halal kecil dekat masjid tersebut. Usai makan, kami lanjutkan perjalanan dengan bersepeda. Sekitar 10 menit, akhirnya kami menemukan masjidnya. Masjid baru ini ternyata posisinya sangat strategis. Di pertigaan jalan besar yang cukup ramai. Relatif dekat dengan stasiun besar kereta api Hankou dan stasiun MRT line 1. Arsitektur bangunannya cukup indah. Memadukan gaya arsitektur Eropa, Arab, dan China. Dengan tinggi bangunan enam lantai. Lahan parkirnya cukup luas. Di samping gerbang masuk masjid dibangun ruko-ruko panjang. Karena belum beroperasi, maka kami belum bisa masuk. Cukup hanya memfoto dari luar saja. Masjid ini akan menjadi masjid terbesar dan terbagus di Kota Wuhan. Saya cek di peta, lokasi masjid ini sekitar

20 kilometer dari kampus saya, Central China Normal University (CCNU). Dan sekitar 30 kilometer dari tempat tinggal saya. Cukup jauh. Bersyukur, di dekat tempat tinggal saya ada satu masjid, Masjid Majiazhuang. Warung Halal Mencari makanan halal atau pun warung halal di kota ini relatif cukup mudah. Apalagi kalau hanya tinggal di asrama kampus. Dijamin ada kantin halal di dalamnya. Akan tetapi bagaimana jika di luar kampus? Kebetulan saya tinggal di luar kampus dengan menyewa apartemen bersama keluarga. Jarak apartemen ke kampus saya sekitar 12 kilometer. Bisa ditempuh dengan naik motor listrik sekitar 30 menit. Naik bis kota juga sama. Sepanjang jalan dari apartemen ke kampus setidaknya ada 12 warung halal yang saya temukan. Tidak akan takut lapar apalagi susah mencari yang halal. Menemukan warung halal di China termasuk mudah. Dengan logo tulisan Halal atau 清真 Qingzhen (baca: Tsingcen) terpampang di luar bangunan yang menyertai nama warungnya. Menu khasnya adalah mie lamian, atau mie ramen. Semangkok besar mulai dari harga 10 yuan hingga sekitar 20 yuan. Kalau ingin nasi, variasinya juga banyak. Seperti nasi goreng hanya 10 yuan. Warung-warung halal itu kebanyakan dimiliki oleh para perantau Suku Hui Muslim dari daerah Gansu atau Qinghai. Dua provinsi yang mayoritas dihuni oleh Suku Hui Muslim yang terletak di Barat Laut China. Mereka tidak sembarangan menempelkan logo halal di warungnya. Biasanya sertifikat Halal ditempel di dinding warungnya. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Asosiasi Muslim setempat. Disamping sertifikat halal, biasanya juga ada sertifikat keamanan dan kebersihan warung makan yang ditempel. Lengkap dengan nama dan foto pemilik warung dan level peringkatnya dari A, B atau C. Peringkat A adalah level terbaik. Sertifikat itu dikeluarkan oleh otoritas pemerintah lokal. Atau semacam Badan POM kalau di Indonesia. Tanpa ada sertifikat itu, warung-warung tersebut tidak akan mendapat izin operasional. Mencari makanan atau warung halal di China juga cukup mudah dengan dibantu oleh aplikasi Baidu atau aplikasi peta seperti Baidu Map, Amap, Tencent Map, atau di Alipay dan lain sebagainya. Bisa juga dengan Google Map. Tapi harus dibuka dengan perangkat VPN. Karena Google salah satu aplikasi yang diblokir di China. Saya lebih merekomendasikan menggunakan aplikasi lokal China. Lebih akurat dan aktual. Di aplikasi-aplikasi tersebut, cukup ketik tulisan 清真 Qingzhen, maka akan muncul banyak warung di sekitar kita. Lengkap dengan jarak tempuh dan rutenya dengan jalan kaki, sepeda atau transportasi umum. Jika masih susah mencari. Bisa pesan dengan metode food delivery atau dikenal dengan 外卖 Waimai. Banyak provider aplikasi Waimai di China seperti Meituan, Eleme dan sebagainya. Tarif tambahannya juga tidak terlalu mahal, biasanya sekitar 3 yuan tiap transaksi. Alhamdulillah, di kota yang penduduknya sekitar 12 juta dan dengan jumlah Muslim lokal sekitar 20 ribu ini, menemukan masjid dan makanan halal dimana-mana adalah berkah dan kenikmatan tersendiri. Tak perlu risau, apalagi galau...¹

4. KESIMPULAN

1. Para Santri yang melawat ke Tiongkok mewarnai panggung dan wacana hubungan diplomatik Indonesia Tiongkok. Mereka memberikan diskursus alternatif agar supaya pemerintah di kedua

¹ Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/113340/safari-jumat-ke-tiga-masjid-di-wuhan--china>

negara terutama kalangan elit politik dan kalangan bisnis tidak melihat hubungan kedua negara hanya pada sektor bisnis. Ada banyak hal kegiatan yang bisa diperbincangkan dan dikerjakan untuk memperkuat kedua negara sehingga tidak terbatas pada urusan bisnis soal untung dan rugi

2. Para Santri memberikan perspektif baru bahwa Tiongkok Modern berbeda dengan Tiongkok Lama yang dipersepsikan oleh Rezim Orde Baru. Tiongkok modern berbeda dengan Tiongkok yang dipahami dalam meta narasi sejarah anti komunis dan anti Tiongkok yang sangat mengakar itu. Para Santri ini seperti melawan ombak besar yang sangat kuat yang mana politik resmi dan sejarah resmi Indonesia masih menganggap Tiongkok sebagai komunis dan ateis yang buruk, jahat, dan negatif. Para santri ini kemudian memberikan kabar secara lisan, tertulis, dan intinya secara sporadis namun penting bahwa di Tiongkok ada masjid, ada restoran halal, ada makanan halal, dan ada komunitas muslim yang bebas beribadah.

Daftar Pusaka

- [1] Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Penerjemah Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983
- [2] Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982. Zuhri, Saifuddin (1974), *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Bandung: PT Alma'arif
- [3] Ahmad Syaifuddin Zuhri (editor), *Islam Indonesia dan Tiongkok, Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok*, Aswaja Nusantra Press, PCNU Tiongkok, dan KBRI Beijing, 2019
- [4] Novi Basuki, *Ada Apa Dengan Tiongkok*, Yogyakarta, Penerbit Buku Mojok, 2019
- [5] Wibowo, Igantius, *Belajar dari Tiongkok*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004
- [6] Sweetman, A & Jun Zhang. *Economic Transition with Chinese Characteristic: Thirty Years of Reform and Opening Up*. Montreal: McGill-Queen University Press, 2008
- [7] Sukma, Rizal. *Indonesia and Tiongkok: The Politics of a Troubled Relationship*, London: New York: Routledge, 1999. Sukma, Rizal (2009).
- [8] Indonesia's Perceptions of Tiongkok: The Domestic Bases of Persistent Ambiguity. Dalam Yee, H. & I. Storey (ed.). *The Tiongkok Threat: Perception, Myth and Reality*. London: RoutledgeCurzon, 183-207. Suryadinata, Leo. (2017). General Gatot and the Re-emergence of Pribumi-ism in Indonesia. *ISEAS Perspective* 49.7 July.
- [9] Woodward, Mark. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, Tucson AZ: University of Arizona Press, 1989.
- [10] Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- [11] van Bruinessen, Martin. (1996), NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LkiS, 1996
- [12] Hong Liu. (2015). *Sukarno, Tiongkok, dan Pembentukan Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu. Sukma, Rizal 2009

- [13] Muas, R Tuty Nur Mutia Enoch. *Diplomasi Tanpa Kehilangan Muka: Peran Konsep Mianzi Dibalik Normalisasi Hubungan Diplomatik Tiongkok Indonesia Tahun 1990*, Tangerang Selatan: Penerbit Serat Alam Media, 2015.
- [14] Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2012
- [15] Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II : Jaringan Asia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Forum Jakarta Paris, 2008